

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, 2010, Ilmu Negara, cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Achmad Ali, 2012, Mengungkap Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*judicial prudence*), Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006, Filsafat Hukum. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Amieroeddin Syahrif, 2011, Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan, 2012, Dasar Perundang-undangan Indonesia, Indonesia *Hill co*, Jakarta.
- Bagir Manan, 2015, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan Tingkat Daerah, LPPM, Universitas Bandung, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Sebagai Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Manda Maju, Bandung.
- Emile Durheim, 1964, *The Devision of Labor in Society*, George Simpson, New York :*The Free Press*.
- Esmi Warasih, 2011, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Abdulrahman, 2012, Beberapa Pemikiran tentang Peraturan Perundang-undangan.
- Irawan Soejito, 2013, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2009, Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di lingkungan Peradilan Umum, Publikasi Komnas Perempuan.
- Lexy J. Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Maria Farida Indrati S, 2017, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, PT. RefikaAditama, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, penerapan Teori Hukum pada Thesis dan Desertasi, Jakarta:Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1989, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Asmaul Khusnaeny dkk, 2018. “Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)”, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Atika Rahmi, 2018, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, Vol. 11, Mercatoria, Sumatera Utara.\
- Lawrence M. Friedman dalam Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Jan S. Marinka, 2015, *Kewenangan Jaksa Sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Masyarakat Pemantau Keadilan Fakultas Hukum, Jakarta.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum> . Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

Lawrence M. Friedman dalam Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 164.

Muh. Sudirman Sesse, 2013, “Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2.

Asmaul Khusnaeny dkk, 2018, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, *Jurnal Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat –Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Otje Salman, 2006, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alui, Bandung.

K. Chairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2021.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.